

## **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi**

**Fadia Yuliza Fitri\*, Wiyan Mailindra**

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

\*Correspondence: [yulizafitriefadia@gmail.com](mailto:yulizafitriefadia@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah dan upah minimum terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif kaulitas. Dengan menggunakan alat analisis berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk *time series* yaitu data pengeluaran pemerintah, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari Tahun 2014-2023 yang diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

**Kata kunci** : upah minimum provinsi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi.

### **ABSTRACT**

*This research aims to measure the influence of government spending and minimum wages on the level of economic growth in Jambi Province. The method used is quantitative causality using multiple analysis tools. The data used is secondary data in the form of a time series, namely data on government expenditure, minimum wages and economic growth for Jambi Province from 2014-2023 obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analytical tool used is multiple regression. The research results show that government spending and minimum wages do not have a significant effect on the level of economic growth in Jambi Province.*

**Keywords** : provincial minimum wage, government spending, economic growth.

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator berkembang atau tidaknya suatu negara. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai *modern economic growth* (Amdan & Sanjani, 2023). Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari penambahan pendapatan perkapita dalam jangka panjang sehingga ketika terjadi pertumbuhan ekonomi berarti terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat (Ernita, et al. 2013). Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan menuju ke arah yang lebih baik, tercatat pada triwulan 1 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03%.

**Tabel 1**  
**Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Jambi Periode 2014-2023**

| Tahun | Indonesia | Provinsi Jambi |
|-------|-----------|----------------|
| 2014  | 5,02      | 7,63           |
| 2015  | 4,79      | 4,21           |
| 2016  | 5,02      | 4,37           |
| 2017  | 5,07      | 4,60           |
| 2018  | 5,17      | 4,69           |
| 2019  | 5,02      | 4,35           |
| 2020  | 2,07      | -0,51          |
| 2021  | 3,69      | 3,69           |
| 2022  | 5,31      | 5,13           |
| 2023  | 4,94      | 4,86           |

Sumber: data olahan

Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Provinsi Jambi berfluktuasi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Jambi terendah pada tahun 2020 dengan angka sebesar Indonesia 2,07% dan Provinsi Jambi minus 0,51% untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yaitu terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,17% sedangkan untuk Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,36%. Sedangkan di sisi pengeluaran pemerintah, Indonesia terus meningkatkan nilai APBN sebagaimana yang diketahui, pengeluaran pemerintah dalam APBN adalah jumlah atau nominal yang terdiri dari beberapa rincian belanja, baik dilihat dari pembagian jenis fungsi dan belanja, maupun dari mekanisme pengalokasiannya. Pengeluaran pemerintah ada yang dibelanjakan dalam bentuk cash atau ada juga melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pelelangan umum atau seleksi sesuai peraturan yang berlaku.

**Tabel 2**  
**Data Pengeluaran Pemerintah Indonesia dan Provinsi Jambi Periode 2014-2022**

| Tahun | Indonesia     | Provinsi Jambi |
|-------|---------------|----------------|
| 2014  | 1,203,577,200 | 11,683.336,802 |
| 2015  | 1,183,303,700 | 11,799,163,000 |
| 2016  | 1,154,018,200 | 13,126,708,292 |
| 2017  | 1,265,359,400 | 4,583,486,000  |
| 2018  | 1,455,324,800 | 4,869,536,000  |
| 2019  | 1,496,313,900 | 5,244,690,000  |
| 2020  | 1,832,950,900 | 5,244,899,000  |
| 2021  | 2,000,703,800 | 4,430,392,751  |
| 2022  | 2,280,027,900 | 4,795,846,912  |

Sumber: data olahan

Tabel 2 dapat dilihat pengeluaran pemerintah Indonesia dan Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dimana pengeluaran pemerintah Indonesia tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 13.126.708.292 M dan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 4.583.486.000 M, sedangkan pada Provinsi Jambi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1,154,018,200 T dan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,280,027,900 T. selanjutnya, kenaikan upah minimum di Kabupaten/Kota turut berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan peningkatan kapasitas negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang. Peningkatan upah bagi pekerja dapat meningkatkan daya beli, mendorong motivasi kerja, dan potensialnya untuk meningkatkan produktivitas. Namun, bagi pengusaha yang melihat upah sebagai biaya, peningkatan ini memerlukan penyesuaian terhadap tingkat upah yang ditetapkan pemerintah.

**Tabel 3**  
**Data Upah Minimum Indonesia dan Provinsi Jambi periode 2014-2023**

| Tahun | Indonesia    | Provinsi Jambi |
|-------|--------------|----------------|
| 2014  | 1 584 391,00 | 1 502 230,00   |
| 2015  | 1 790 342,00 | 1 710 000,00   |
| 2016  | 1 997 819,00 | 1 906 650,00   |
| 2017  | 2 162 639,00 | 2 063 948,00   |
| 2018  | 2 351 004,00 | 2 243 718,00   |
| 2019  | 2 546 137,00 | 2 243 718,00   |
| 2020  | 2 670 000,00 | 2 630 162,00   |
| 2021  | 2 680 000,00 | 2 630 162,00   |
| 2022  | 2 720 000,00 | 2 698 940,00   |
| 2023  | 2 923 309,00 | 2 943 033,00   |

Sumber: data olahan

Tabel 3 dapat dilihat bahwa upah minimum Provinsi Jambi dari tahun 2014-2023 terus mengalami kenaikan dengan rata rata pertahun upah minimum di Indonesia mengalami kenaikan sebesar (jumlah dibagi dengan banyak) dengan rata rata kenaikan upah minimum Indonesia, dan upah minimum Provinsi Jambi mengalami kenaikan dengan rata-rata Rp.160.089,22 per Tahun.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausalitas yang berbentuk asosiatif menggunakan dua variabel bebas yakni pengeluaran pemerintah dan upah minimum provinsi serta satu variabel terikat pengeluaran pemerintah. Data yang digunakan yaitu *time series* dari tahun 2014-2023 dari BPS (Sugiyono, 2019). Data sekunder tersebut diolah menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan pengolahan kuantitatif meliputi beberapa pengujian yakni uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis yang secara keseluruhan menggunakan analisis regresi dengan variabel *Intervening* dengan menggunakan bantuan SPSS. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan rumus: (Manzilati, 2017)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan: Y = tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (%);  $\beta_0$  = konstanta;  $\beta_{12}$  = koefisien regresi;  $X_1$  = pengeluaran pemerintah; dan  $X_2$  = upah minimum Provinsi Jambi

## HASIL

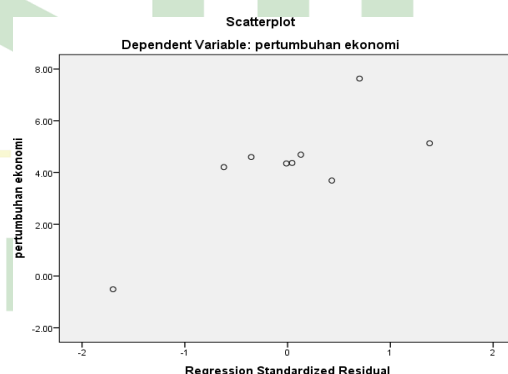
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kolmogorov-smirnov. Data akan berdistribusi normal jika nilai asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari alpha (0,5). Berdasarkan Tabel 1 diperoleh nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,200 dimana nilai tersebut diatas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Sedangkan Gambar 1 terlihat bahwa scatter plots menyebar secara acak di atas maupun di bawah garis horizontal, dan menyebar secara acak di bagian kanan dan kiri garis vertikal, serta plots tersebut tidak membentuk suatu pola. Dengan demikian, dapat dikatakan varian dalam data penelitian ini bersifat homogen atau sama.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

| Asymp. Sig (2-Tailed) | Alpha |
|-----------------------|-------|
| 0,200                 | 0,05  |

Sumber: data olahan

Dari tabel 3.1 diatas, maka diperoleh nilai Assymp. Sig (2- Tailed) sebesar 0,200 dimana nilai tersebut jauh diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| No | VIF   | Nilai baku |
|----|-------|------------|
| 1  | 2.853 | 10         |
| 2  | 2.853 | 10         |

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, diperoleh nilai korelasi antar variabel bebas dimana nilai kolerasinya 2.853 yang lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinear antar variabel bebas dalam penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi**

| Variabel                  | Kofisien Regresi | Sig   |
|---------------------------|------------------|-------|
| konstanta                 | 6,729            | 0,188 |
| Pengeluaran Pemerintah X1 | 0,059            | 0,880 |
| Upah Munimum Provinsi X2  | -0,959           | 0,369 |

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 6,729 + 0,059 X_1 - 0,959 X_2$ . persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstantanya sebesar 6,729 dan nilai koefisien  $X_1$  sebesar 0,059 dan koefisien variabel  $X_2$  -0,959 dapat dikatakan bahwa ketika terjadi kenaikan variabel  $X_1$  dalam hal ini pengeluaran pemerintah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) begitupun dengan ketika variabel  $X_2$  dalam hal ini upah minimum mengalami peningkatan akan meningkatkan variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Namun nilai signifikansi yang diperoleh untuk variabel Y sebesar 0,188,  $X_1$  0,880 dan  $X_2$  0,369 dapat dikatakan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05 berarti antara  $X_1$  dan  $X_2$  tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap Y.

**Tabel 3**  
**Hasil uji t**

| variabel                    | tbilang | ttabel  | sig   | alpha |
|-----------------------------|---------|---------|-------|-------|
| Pengeluaran pemerintah (x1) | 0,059   | 2,36462 | 0,880 | 0,050 |
| Upah minimum provinsi (x2)  | -0,361  |         | 0,369 |       |

Sumber: Data olahan

Dari tabel di atas maka dapat di lihat nilai thitung sebesar 0,059 dimana nilainya lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 2.36462. dengan nilai signifikansinya sebesar 0.880 yang lebih besar dari nilai alpha 0.050. maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan antara  $X_1$  (pengeluaran pemerintah) terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi).

Untuk variabel  $x_2$  nilai yang ditentukan sebesar -0,361 dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel yaitu 2,36462 dengan nilai kepentingan sebesar 0,880 yang lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,050. Jadi cenderung diasumsikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan antara  $X_2$  (Upah Minimum Privinsi) terhadap faktor Y (Pertumbuhan Ekonomi).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji F**

| F-hitung | F-tabel | Sig   | Alpha |
|----------|---------|-------|-------|
| 0,620    | 3.71    | 0,505 | 0.050 |
| R        | 0,388   |       |       |
| R Square | 0,150   |       |       |

Sumber: data olahan

Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 0,620 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,71 dengan tingkat signifikansi  $0,505 > 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan nilai R-Square sebesar 0,388 nilai tersebut menunjukkan besarnya persentase pengaruh antara variabel independen dan dependen sebesar 38,8%.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji R**

| Model | R     | Rsquare |
|-------|-------|---------|
| 1     | 0,388 | 0,150   |

Sumber: data olahan

Melihat tabel di atas diketahui R square adalah 0,388. Nilai tersebut menunjukkan besarnya tingkat pengaruh antara faktor x dan y, yaitu  $0,388 \times 100 = 38,8\%$ . Besar kecilnya pengaruh faktor x dan y diperkirakan sebesar 38,8%.

#### *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi*

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi dari tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan hal tersebut pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 walaupun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan tetapi pertumbuhan ekonomi justru turun hingga menuju angka 0,51; hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi yang tidak mampu bertahan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Sholeh, 2021);(Sari et al., 2016); (Pangiuik, 2017) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah pengeluaran pemerintah yang tidak tepat pada sasaran dan pengeluaran pemerintah yang lebih banyak ke belanja pegawai.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dapat dijelaskan secara ilmiah melalui pendekatan teori ekonomi publik, khususnya dalam kerangka *Keynesian Theory* dan teori efektivitas belanja pemerintah. Secara teoritis, menurut pemikiran John Maynard Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong permintaan agregat (*aggregate demand*) yang pada akhirnya dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada komposisi dan kualitas belanja tersebut. Jika pengeluaran lebih dominan dialokasikan pada belanja rutin seperti belanja pegawai dibandingkan belanja modal yang produktif, maka efek penggandanya (*multiplier effect*) terhadap perekonomian menjadi rendah. Hal ini menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah tidak secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Menurut peneliti, pengeluaran pemerintah sebenarnya tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran. Peningkatan anggaran tanpa diiringi dengan pengelolaan yang efektif hanya akan meningkatkan angka belanja secara administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada belanja yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, penguatan sektor UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, transparansi dan evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan juga menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, bukan hanya besarnya pengeluaran yang penting, tetapi bagaimana pengeluaran tersebut dikelola secara efektif dan tepat sasaran.



### *Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi*

Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa upah minimum Provinsi Jambi dari tahun 2014-2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan hal tersebut pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa peningkatan upah minimum provinsi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini didukung penelitian (Sabihi et al., 2021) dan (Nofrita & Marwan, 2022) yang menyatakan bahwa pengaruh UMP terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif, artinya UMP tidak dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor yang menyebabkan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah upah minimum rata-rata tidak terlalu banyak meningkat dari tahun ke tahun.

tidak signifikannya pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori pasar tenaga kerja dan teori produktivitas. Dalam perspektif neoklasik, upah merupakan cerminan dari produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah minimum yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas justru dapat menimbulkan inefisiensi dalam pasar tenaga kerja. Perusahaan akan cenderung mengurangi tenaga kerja atau menahan ekspansi usaha untuk menekan biaya produksi, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan teori *efficiency wage* yang menyatakan bahwa peningkatan upah hanya akan berdampak positif jika mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, secara struktural, kondisi perekonomian daerah seperti Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor primer dan sektor informal juga menjadi faktor penting yang menjelaskan lemahnya pengaruh upah minimum. Dalam sektor informal, kebijakan upah minimum seringkali tidak diterapkan secara penuh, sehingga kenaikan UMP tidak secara langsung meningkatkan daya beli mayoritas masyarakat. Akibatnya, peningkatan konsumsi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara signifikan.

Menurut peneliti, kenaikan UMP memang penting dari sisi perlindungan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh faktor produktivitas, investasi, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas iklim usaha. Jika kenaikan UMP tidak diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan efisiensi produksi, maka dunia usaha akan kesulitan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, kebijakan upah minimum sebaiknya diimbangi dengan program pelatihan kerja, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif agar kenaikan upah dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan dan parsial pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama Periode 2014-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan nominal pengeluaran pemerintah dan kenaikan upah minimum belum mampu menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara ilmiah, kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan fiskal daerah masih belum optimal, khususnya dalam hal alokasi belanja yang belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian. Selain itu, kenaikan upah minimum yang terjadi juga belum cukup kuat dalam meningkatkan daya beli masyarakat secara luas, terutama karena masih dominannya sektor informal serta belum meratanya implementasi kebijakan upah minimum di lapangan.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti investasi, produktivitas tenaga kerja, struktur ekonomi daerah, serta perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi modern yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dengan lebih memprioritaskan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap sektor UMKM. Hal ini penting agar pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Selanjutnya, dalam penetapan kebijakan upah minimum, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Kenaikan upah minimum sebaiknya diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasi, serta penguatan keterampilan agar mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amdan, L., & Sanjani, M. R. 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia . *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119
- Anitasari, Merri & Soleh, Ahmad. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 3.
- Asfi Manzilati. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: UB Press
- Dewi et al., 2013 Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, DAN KONSUMSI DI INDONESIA Oleh : Dewi Ernita \* , Syamsul Amar \*\* , Efrizal Syofyan \*\*\*
- Ernita, Dewi, et al. 2013, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(2)
- Nofrita, C., & Marwan, M. 2022. Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(2), 179-187
- Pangiuk, A. 2017. Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 1(1), 1-20.
- PS Utami, Masturoh & Anggita, 2018. pengaruh Upah minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten tahun 2010-2016.
- Sabaruddin, Raja, 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu.
- Sabihi, Dewi M., Anderson G. Kumenaung, Audie O. Niode, 2021, Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 25-36
- Sarkoro & Zulfikar, 2018. DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. 2016. Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 3(2), 109-115
- Sholeh, 2021. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu.